



Ringkasan Kebijakan No. 27

## Merencanakan Pengembangan Pangan Akuatik (*Blue Foods*) di Indonesia

oleh Sarah Firdausi dan Ibnu Budiman



### Pesan Utama

- Memaksimalkan potensi produksi dan konsumsi pangan akuatik (*blue foods*) sangat diperlukan untuk mencapai ketahanan pangan serta mendorong ekoregionalisasi sistem pangan.
- Untuk meningkatkan konsumsi pangan akuatik, dibutuhkan pendekatan pasar yang berfokus pada ketersediaan, keterjangkauan, aksesibilitas, tahap perkembangan pasar, dan preferensi budaya konsumen.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Bappenas perlu memasukkan data pangan akuatik — seperti preferensi konsumen, distribusi regional, nilai impor dan ekspor berdasarkan jenis ikan, dan konsumsi berdasarkan jenis ikan pada tingkat subnasional—serta hasil Blue Food Assessment ke dalam Dasbor Sistem Pangan Indonesia (DSPI) untuk mendukung pembuatan kebijakan berbasis bukti.

# Perkembangan Sektor Pangan Akuatik di Indonesia

Menyongsong satu abad kemerdekaan Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menerbitkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2024–2045 untuk meraih target Indonesia Emas 2045. Salah satu dari 17 arah pembangunannya adalah mencapai ketahanan pangan. Menurut Indeks Ketahanan Pangan Global (Global Food Security Index<sup>1</sup> atau GFSI), Indonesia menempati peringkat ke-63 dari 113 negara. Meski menunjukkan kinerja yang baik pada dimensi keterjangkauan pangan, Indonesia masih mendapatkan skor “sangat lemah” dan “lemah” untuk berbagai indikator pada dimensi ketersediaan, kualitas dan keamanan, serta keberlanjutan dan adaptasi.

Di dalam rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Bappenas menekankan peningkatan kapasitas produksi pangan domestik. Dokumen tersebut secara spesifik menyebutkan pangan akuatik (*blue foods*) sebagai elemen intervensi utama untuk mewujudkan ketahanan pangan. RPJMN 2025–2029 juga menyoroti peningkatan asupan gizi masyarakat Indonesia sebagai sebuah isu transformasi sosial yang strategis. Peralannya, pemerintah belum berhasil mencapai target menurunkan prevalensi *stunting* balita ke angka 14% pada 2024. Hal ini menunjukkan perlunya memperbaiki strategi untuk memenuhi kebutuhan gizi 282 juta masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, pangan akuatik memiliki potensi untuk meningkatkan asupan gizi sekaligus memperkuat ketahanan pangan (GAIN, 2023).

Pangan akuatik, mencakup segala jenis tumbuhan dan hewan yang berasal dari perairan yang layak dikonsumsi manusia. Ikan, sebagai salah satu jenis pangan akuatik yang paling populer, sangatlah kaya akan kandungan nutrisi penting, seperti protein berkualitas tinggi, asam lemak omega-3, dan berbagai vitamin dan mineral (Crona *et al.*, 2023). Selain itu, budi daya ikan menghasilkan emisi karbon yang lebih rendah daripada sumber protein lainnya, seperti daging sapi, kambing, dan babi (Poore & Nemecek, 2018), dan setara dengan unggas. Penangkapan ikan di alam liar dapat menghasilkan sekitar 2–15 kg CO<sub>2</sub>-eq per kg ikan yang ditangkap—tergantung faktor-faktor seperti metode penangkapan dan jenis ikannya (Wang *et al.*, 2024). Sementara itu, unggas menghasilkan 9,87 kg CO<sub>2</sub>-eq per kg dan daging sapi 99,48 kg CO<sub>2</sub>-eq per kg (Poore & Nemecek, 2018). Ikan berlemak dan ikan kecil memberikan nilai gizi tinggi dengan dampak lingkungan yang relatif rendah (GAIN, 2024).

Indonesia belum sepenuhnya mengintegrasikan pangan akuatik untuk memaksimalkan potensinya dalam menyediakan nutrisi yang cukup, beragam, dan seimbang untuk makanan yang sehat dan aman bagi semua (Bappenas, 2024a). Perikanan skala kecil, yang membentuk sekitar 90% sektor perikanan di Indonesia, mengalami susut hasil produksi ikan hingga sebesar 30%, atau setara dengan 75.000–125.000 ton per tahun (GAIN, 2020). Jumlah ini terbilang cukup signifikan, mengingat posisi Indonesia sebagai produsen ikan terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Kendati demikian, tingkat konsumsi ikan per kapita di Indonesia, khususnya konsumsi ikan laut, masih relatif rendah. Kurangnya kebijakan, belum memadainya teknologi dan pasokan energi, serta terbatasnya ketersediaan air bersih dalam rantai nilai pangan akuatik merupakan beberapa faktor utama yang mengakibatkan kemerosotan produksi ikan, susut hasil produksi ikan, serta penurunan konsumsi ikan (Budiman *et al.*, 2023).

Untuk memaksimalkan potensi pangan akuatik, Bappenas telah menyusun Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia (2023) yang bertujuan mencapai Visi Indonesia 2045 untuk ekonomi biru. Menindaklanjuti peta jalan tersebut, Bappenas baru-baru ini menerbitkan ringkasan Penilaian Pangan Akuatik di Indonesia (2024). Penilaian ini mengidentifikasi serta memetakan situasi pangan akuatik di Indonesia, dengan tujuan memperkuat peran sektor ini dalam sistem pangan. Penilaian tersebut mencakup lima dimensi: gizi, lingkungan, perikanan dan budi daya perairan skala kecil, keadilan dan produktivitas, serta penciptaan nilai dan ekspor. Pada 2022, pangan akuatik memberikan kontribusi sebesar 2,59% terhadap produk domestik bruto (PDB), dengan nilai ekspor mencapai US\$ 6,24 miliar. Meski dokumen-dokumen ini menjadi landasan pendekatan Indonesia terhadap sektor pangan akuatik, pencapaian visi akan ditentukan oleh manajemen yang efektif serta pembuatan kebijakan berbasis bukti.

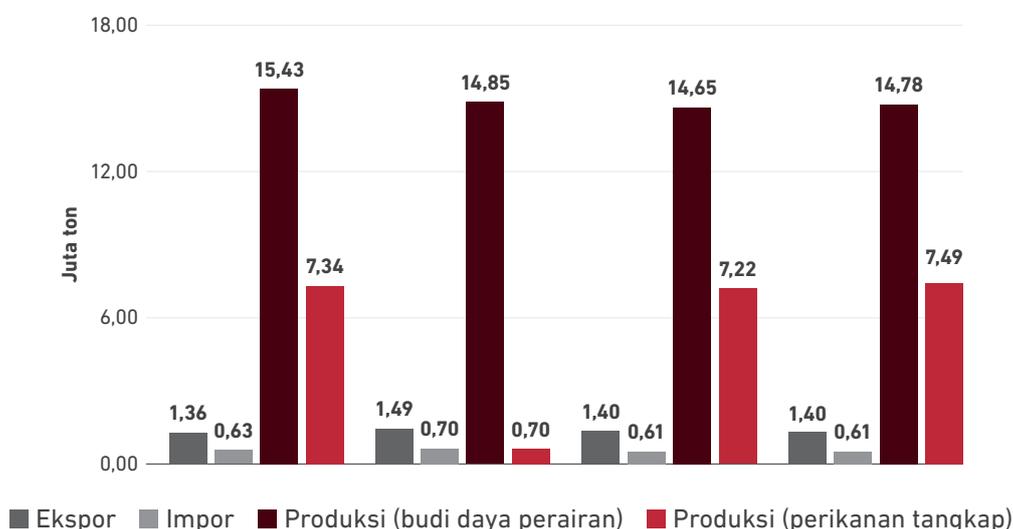
---

<sup>1</sup> GFSI menilai ketahanan pangan 113 negara melalui empat dimensi: keterjangkauan (*affordability*), ketersediaan (*availability*), kualitas dan keamanan (*quality and safety*), serta keberlanjutan dan adaptasi (*sustainability and adaptation*).

# Produksi, Konsumsi, dan Ekspor Pangan Akuatik

Pada 2023, nilai produksi ikan Indonesia mencapai Rp 463,5 triliun (Statistik Kementerian Perikanan dan Kelautan [KKP], 2024). Hal ini menjadikan Indonesia sebagai produsen ikan terbesar di kawasan ASEAN<sup>2</sup>. Menurut Pusat Pengembangan Perikanan Asia Tenggara (Southeast Asian Fisheries Development Center atau SEAFDC) (2024), jumlah produksi perikanan tangkap dan budi daya perairan Indonesia—apabila digabung—mencapai 22,6 juta ton per tahun selama periode 2017–2021 (lihat Gambar 1). Angka ini setara dengan kurang lebih 36,3% dari nilai keseluruhan produksi perikanan di kawasan ASEAN. Sektor yang berkembang pesat ini mempekerjakan sekitar tiga juta pekerja di sektor perikanan tangkap laut dan perairan darat serta dua juta pekerja di sektor budi daya perairan (Statistik KKP, 2024). Namun, sekitar 90% dari sektor ini merupakan perikanan skala kecil, yang kesejahteraannya kerap terabaikan. Tantangan utama di sektor perikanan skala kecil meliputi pengelolaan perikanan yang tidak efektif, penurunan stok ikan, dan ketidakmampuannya untuk bersaing dengan perikanan skala besar. Faktor-faktor tersebut mendorong para nelayan kecil untuk lebih berfokus pada pasar ekspor karena harga yang lebih menguntungkan (Sari *et al.*, 2021).

**Gambar 1.**  
Produksi, Impor, dan Ekspor Ikan di Indonesia (2019–2022)



Sumber: Dasbor Sistem Pangan, 2024; Statistik KKP, 2024

Menurut Dasbor Sistem Pangan Global (Global Food System Dashboard), Indonesia juga mencatatkan nilai ekspor dan impor yang relatif tinggi dibandingkan dengan negara anggota ASEAN lainnya. Indonesia menjadi net eksportir ikan selama dua belas tahun berturut-turut, dari 2010 hingga 2021. Potensinya yang menjanjikan menjadi salah satu faktor mengapa Pemerintah Indonesia cenderung mengelola pangan akuatik sebagai sumber daya alam dan memfokuskannya sebagai komoditas ekspor (Tigchelaar *et al.*, 2022).

Untuk mendorong konsumsi domestik, pemerintah telah mencanangkan intervensi seperti Program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) yang dimulai pada 2004. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga membangun sejumlah infrastruktur pendukung, seperti gudang berpendingin (*cold storage*), sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT), pasar ikan modern, dan fasilitas penunjang lainnya. Upaya ini sesuai dengan amanat Instruksi Presiden (Inpres) No. 7/2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional

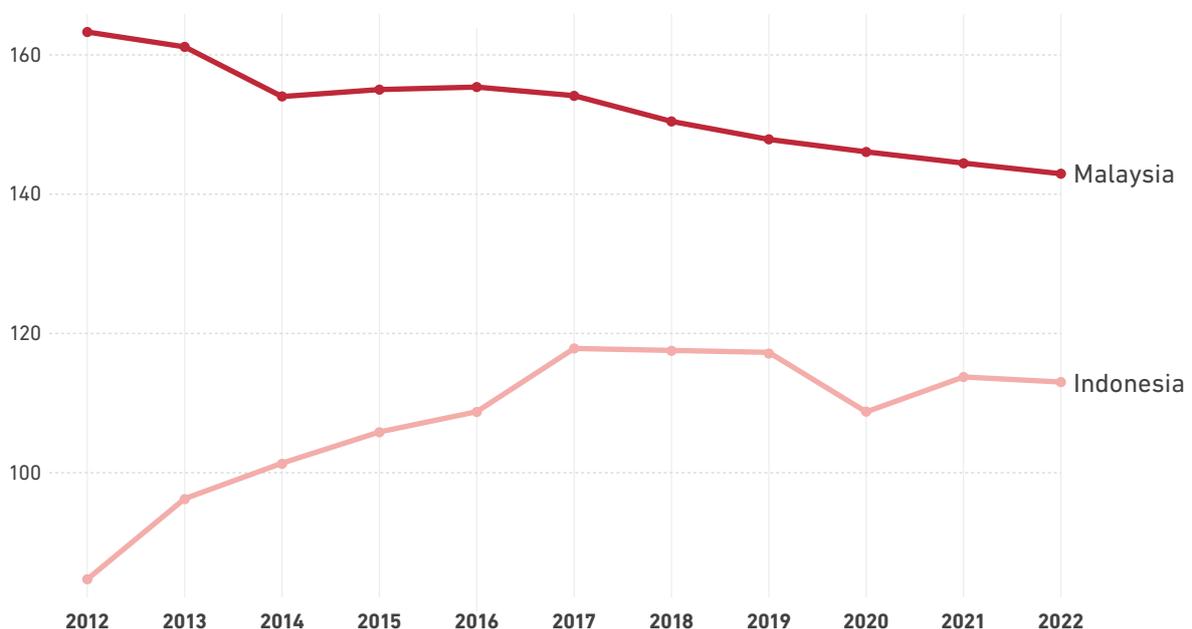
<sup>2</sup> ASEAN (Association of Southeast Asian Nations/Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) adalah organisasi internasional yang terdiri atas sepuluh negara di Asia Tenggara: Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

dan Peraturan Presiden (Perpres) No. 3/2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional. Konsumsi ikan meningkat dari 33,89 kg/kapita/tahun pada 2012 menjadi 36 kg/kapita/tahun pada 2024 (KKP, 2024).

Selain itu, terdapat kendala distribusi yang secara signifikan memengaruhi ketersediaan dan kualitas ikan di Indonesia. Hal ini diakibatkan oleh isu infrastruktur, transportasi, prioritas ekspor, dan praktik penangkapan ikan ilegal (WRI, 2020; CGIAR, 2019). Karena budi daya perairan bersifat musiman, pasokan ikan bisa berlebihan pada periode-periode tertentu sehingga menghasilkan sampah makanan (*food waste*). Tingkat konsumsi ikan laut di Indonesia, yakni 0,88 kg/kapita/tahun, masih lebih rendah daripada negara-negara lain di kawasan ASEAN, seperti Malaysia, Vietnam, Kamboja, dan Myanmar (Lampiran 1). Hal ini mencerminkan rendahnya permintaan domestik terhadap pangan akuatik yang berasal dari laut, yang lantas mendorong perusahaan dan nelayan untuk menjual produk-produknya ke pasar luar negeri (Soares Estefes & Rua, 2013).

Konsumsi ikan juga dapat dikaitkan dengan ketersediaan ikan. Hal ini sebagaimana ditemukan oleh Putriantini *et al.* (2022) bahwa terdapat hubungan positif antara ketersediaan ikan dan sikap terhadap mengonsumsi ikan di kalangan pemuda Indonesia. Ketersediaan ikan merujuk kepada keberadaan sumber daya ikan yang layak dikonsumsi manusia. Jumlahnya ditentukan oleh faktor-faktor seperti produksi (penangkapan di alam liar dan budi daya), impor, ekspor, dan susut hasil pascapanen, serta aksesibilitas dan keterjangkauan di pasar domestik (FAO, 2020). Menurut Dasbor Sistem Pangan, ketersediaan ikan per kapita di Indonesia tertinggal di bawah Malaysia selama sepuluh tahun berturut-turut (lihat Gambar 2), padahal produksi ikan Indonesia jauh melampaui Malaysia. Pasar ikan untuk konsumsi di dua negara ini masih dalam tahap “pertumbuhan”<sup>3</sup>, yang berarti bahwa permintaan pasar akan dapat terus berkembang (Han *et al.*, 2022). Hal ini menghadirkan peluang untuk meningkatkan permintaan terhadap ikan, terutama ikan laut.

**Gambar 2.**  
**Ketersediaan Ikan (g/kapita/hari)**



Sumber: Indonesian Food Systems Dashboard (DSPI)

<sup>3</sup> Menurut Han *et al.*, (2022) “tahap pertumbuhan” dalam konteks pasar ikan untuk konsumsi adalah salah satu dari empat tahap siklus pasar: awal, pertumbuhan, kematangan, dan penurunan. Dalam tahap pertumbuhan, konsumsi ikan melonjak drastis, utamanya berkat pertumbuhan PDB riil dan peningkatan produksi ikan. Tahap ini menunjukkan perluasan permintaan pasar karena makin banyak orang mulai mengonsumsi ikan, didukung oleh perkembangan ekonomi dan produksi.

# Penggunaan DSPI untuk Mendorong Konsumsi Pangan Akuatik

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. 4/2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 mengarahkan regionalisasi sistem pangan berbasis komoditas pangan lokal dan kearifan sosial-budaya lokal sebagai pendekatan untuk meningkatkan ketersediaan, akses, dan kualitas pangan. Sayangnya, strategi untuk pengelolaan kelautan, perikanan, dan wilayah pesisir disebutkan secara terpisah. Melihat potensinya untuk memperbaiki asupan gizi masyarakat Indonesia, pangan akuatik sepatutnya lebih diintegrasikan ke dalam sistem pangan. Strategi regionalisasi seyogianya juga perlu mempertimbangkan aspek-aspek seperti ketersediaan, aksesibilitas, tahap perkembangan pasar (Han *et al.*, 2022), serta preferensi budaya.

Sejalan dengan rencana regionalisasi sistem pangan, Dasbor Sistem Pangan Indonesia (DSPI) yang baru saja diluncurkan dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mendukung penyusunan kebijakan berbasis bukti. Indikator-indikator dari DSPI, didukung oleh data dari KKP, dapat memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang memengaruhi rantai nilai pangan akuatik pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Beberapa indikator berguna yang ada pada DSPI meliputi (i) rata-rata harga kalori (*average caloric price* atau ACP) ikan<sup>4</sup>, (ii) harga kalori relatif (*relative caloric price* atau RCP) ikan<sup>5</sup>, (iii) proporsi konsumsi makanan dan minuman rumah tangga untuk ikan, dan (iv) median pendapatan per orang per hari.

## Studi Kasus 1.

### Contoh Indikator-Indikator Terkait Produksi, Ekspor, dan Konsumsi Ikan di Sulawesi Tengah

Dengan data yang lengkap, pembuat kebijakan dapat menentukan area-area prioritas untuk perbaikan. Sebagai contoh, berikut adalah kompilasi data dan indikator terkait rantai nilai pangan akuatik di Sulawesi Tengah, salah satu wilayah penghasil ikan terbesar di Indonesia.

#### Indikator-Indikator Terkait Rantai Nilai Pangan Akuatik di Sulawesi Tengah

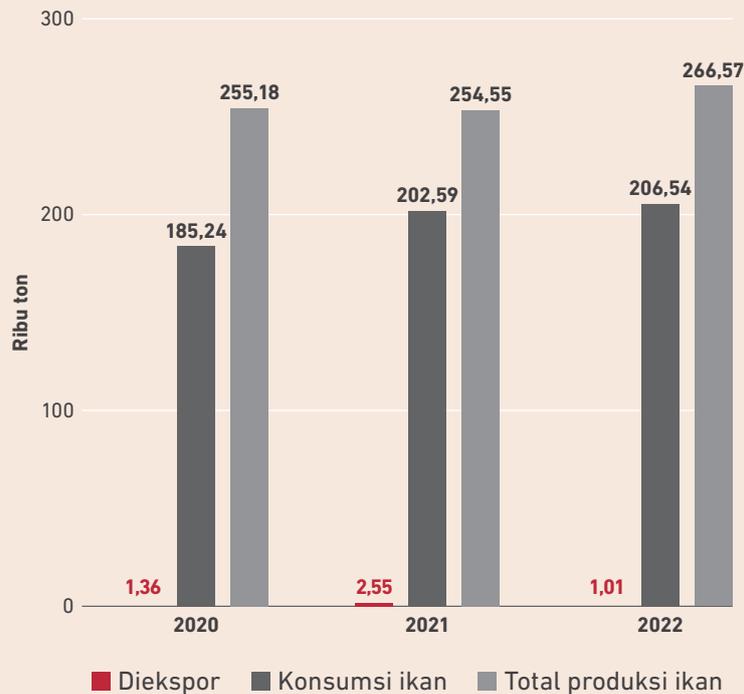
Sulawesi Tengah	2020	2021	2022
Produksi perikanan tangkap (ton)	255.177,9	254.553,1	266.574,1
Konsumsi ikan <sup>6</sup> (ton)	185.234,9	202.586,7	206.535,4
Volume ekspor ikan (ton)	1.355,3	2.552,5	1.010,3
Median pendapatan per orang per hari (Rp)	27.459,0	28.212,0	29.537,6
Proporsi konsumsi makanan dan minuman rumah tangga untuk ikan (%)	10,1	10,8	2,9
Harga kalori relatif (RCP) ikan (Rp/kalori)	18,9	20,4	28,5
Rata-rata harga kalori (ACP) ikan (Rp/kalori)	19,0	20,0	10,4

Sumber: Dikompilasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), Statistik KKP, dan DSPI

<sup>4</sup> Rata-rata harga kalori (APC) ikan adalah biaya per satu kalori dalam rupiah.

<sup>5</sup> Harga kalori relatif (RCP) ikan adalah ukuran biaya untuk memperoleh kalori dari ikan dibandingkan dengan beras sebagai bahan makanan pokok di Indonesia.

<sup>6</sup> Data konsumsi ikan dikompilasi dari angka konsumsi ikan (AKI) dari KKP dan jumlah populasi Sulawesi Tengah untuk masing-masing tahun dari BPS.



Sumber: Dikompilasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), Statistik KKP, dan DSPI

Informasi yang dihimpun dari sumber-sumber seperti DSPI, BPS, dan Statistik KKP menunjukkan kondisi dan tren terkini terkait faktor-faktor utama yang memengaruhi rantai nilai pangan akuatik di Sulawesi Tengah. Data-data ini kemudian dapat dijadikan sebagai landasan informasi dalam penyusunan kebijakan dan strategi daerah tentang pengadaan, pengelolaan, dan konsumsi pangan akuatik.

Seperti dapat dilihat pada Gambar 3, terdapat selisih hingga lebih dari 20% antara produksi ikan dengan total ekspor dan konsumsi ikan di Sulawesi Tengah setiap tahunnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah selisih tersebut berasal dari susut hasil produksi dan kehilangan ikan dalam rantai nilai atau kemungkinan lainnya, seperti distribusi ikan ke wilayah lain di Indonesia. Lebih jauh, pada 2022, RCP ikan naik menjadi Rp 28,5/kalori, sementara ACP-nya menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa, meski harga satu kalori ikan menjadi lebih murah, harga satu kalori beras masih lebih terjangkau daripada ikan. Dengan fakta bahwa alokasi pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi ikan sangat rendah, dapat disimpulkan bahwa masyarakat lebih memilih untuk memenuhi asupan kalorinya dengan mengonsumsi beras daripada ikan. Ringkasan kebijakan ini menyajikan data dari sumber-sumber yang tersedia untuk mengilustrasikan potensi penggunaan berbagai indikator. Dibutuhkan analisis yang lebih komprehensif atas korelasi antarindikator guna mengidentifikasi area-area prioritas untuk memperbaiki sistem pangan.

# Rekomendasi

Pemerintah perlu mempertimbangkan rekomendasi-rekomendasi berikut dalam upaya meningkatkan rantai nilai pangan akuatik untuk ketahanan pangan dan gizi di Indonesia.

- **Menggunakan data dari Dasbor Sistem Pangan Indonesia (DSPI) untuk mengidentifikasi prospek, tantangan, kondisi pasar, dan area prioritas terkait rantai nilai pangan akuatik pada tingkat nasional dan subnasional.** Bappenas dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dapat memanfaatkan serta memperbarui Penilaian Pangan Akuatik secara berkala dan memasukkannya ke dalam DSPI sebagai alat diagnostik untuk mendukung penyusunan strategi ekoregionalisasi sistem pangan dalam Peraturan Kepala Bappenas No. 4/2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 dan instrumen kebijakan lainnya.
- **Mengintegrasikan dataset produksi, ekspor, impor, distribusi regional, dan konsumsi ikan berdasarkan jenis ikan pada tingkat subnasional ke dalam DSPI.** Mempertimbangkan adanya keragaman antarwilayah, sangatlah penting untuk menggunakan pendekatan yang sistematis serta mengidentifikasi berbagai aktor yang terlibat. Dengan menambahkan informasi ke dalam DSPI supaya selaras dengan indikator-indikator dari Dasbor Sistem Pangan Global, para pembuat kebijakan Indonesia dapat membuat analisis yang lebih mendalam untuk menunjang peraturan tentang perencanaan sektor pangan (akuatik). DSPI juga dapat mencakup data-data yang berguna bagi perusahaan, seperti jumlah dan jenis industri ikan, jumlah ikan yang diolah, dan pemetaan industri.
- **Membina kemitraan dengan sektor swasta untuk mengatasi persoalan distribusi ikan dan meningkatkan investasi untuk perbaikan infrastruktur pendukung, seperti rantai dingin.** DSPI juga dapat berguna bagi sektor swasta untuk memperoleh wawasan bisnis. Dengan demikian, mereka dapat mendorong inovasi serta mengoptimalkan sumber daya demi menjamin keberlanjutan dan pengembangan rantai nilai pangan akuatik. Dukungan pemerintah lainnya, seperti investasi pada gudang berpendingin, peningkatan logistik, dan pembukaan akses pasar untuk ikan berkualitas juga tak kalah penting. Pelibatan sektor swasta ke dalam kerangka kerja ini sangat krusial karena keahlian dan sumber daya yang mereka miliki dapat mendorong inovasi dan efisiensi dalam produksi pangan akuatik.

# Referensi

---

- Bappenas. (t.t.). *Data and statistics on Indonesia's development*. Diambil pada Desember 2024, dari <https://dsp.bappenas.go.id/>
- Budiman, I., Wisudyawati, D., & Azzahra, A. (2023). Penyebab dan Dampak Ekologis dari Susut Hasil Produksi Ikan di Indonesia.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2020). *The state of world fisheries and aquaculture 2020: Sustainability in action*. Diambil pada 4 Desember 2024, dari <https://www.fao.org/interactive/state-of-fisheries-aquaculture/2020/en/>
- Food Systems Dashboard. (t.t.). *Food systems dashboard*. Diambil pada Desember 2024, dari <https://www.foodsystemsdashboard.org/>
- GAIN (2023). *Unlocking the Power of Fish: A Tasty Solution to Combat Malnutrition*
- Han, K., Leem, K., Choi, Y. R., & Chung, K. (2022). What drives a country's fish consumption? Market growth phase and the causal relations among fish consumption, production, and income growth. *Fisheries Research*, 254, 106435. <https://doi.org/10.1016/j.fishres.2022.106435>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (t.t.). *Portal data: KKP*. Diambil pada Oktober 2024, dari <https://portaldata.kkp.go.id/#panel-footer-kpda>
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. (2024, Oktober). *Summary: Blue food assessment in Indonesia*. Diambil dari <https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/ypr7OpB6uUv1Nd3?path=%2FBooklet%20Blue%20Food%20Assessment#pdfviewer>
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. (2023). *Indonesia Blue Economy Roadmap*. Diambil dari [https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file\\_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Unit\\_Kerja/Dir%20Industri%2C%20Ekonomi%20dan%20Kreatif/Dummy\\_Indonesia%20Blue%20Economy%20Roadmap\\_Ebook.pdf](https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Unit_Kerja/Dir%20Industri%2C%20Ekonomi%20dan%20Kreatif/Dummy_Indonesia%20Blue%20Economy%20Roadmap_Ebook.pdf)
- Nurhasan, M. (2019, 12 Mei). *Poor fishery management costs Indonesia \$7 billion per year. Here's how to stop it*. The Conversation. Diambil pada November 2024, dari <https://theconversation.com/poor-fishery-management-costs-indonesia-7-billion-per-year-heres-how-to-stop-it-109671>
- Putriantini, I. N., Dityanawarman, A., Inayah, I., & Rahman, H. (2022). A model of fish consumption among Indonesian youth with the moderation on their perception of fish quality assurance. *Jurnal Perikanan Universitas Gadjah Mada*, 24(1), 11. <https://doi.org/10.22146/jfs.68366>
- Robyn, B., Andesta, I., Wirandi, W., Poerwadi, B. S., & Nikijuluw, V. (2020). *Why fish? Reasons, challenges, and measures to increase fish consumption in Indonesia*. World Resources Institute Indonesia. Diambil pada 11 Januari 2025, dari <https://wri-indonesia.org/en/insights/why-fish-reasons-challenges-and-measures-increase-fish-consumption-indonesia>
- Soares Esteves, Paulo; Rua, António (2013). *Is there a role for domestic demand pressure on export performance?*, ECB Working Paper, No. 1594, European Central Bank (ECB), Frankfurt a. M.
- Tigchelaar, M., Selig, E. R., Allison, E. H., Basurto, X., Bennett, A., Bush, S. R., Cao, L., Cheung, W. W. L., Crona, B., Gephart, J. A., Halpern, B. S., Hicks, C. C., Hoey, J. A., Huang, H., Koehn, J. Z., Macadam-Somer, I., McCauley, D. J., Naylor, R. L., Oyintola, M. A., ... & Ziegler, F. (2022). *The vital roles of blue foods in the global food system*. *Nature*, 598(7880), 315–320. <https://doi.org/10.1038/s41586-021-03917-1>

# Lampiran

## Konsumsi Ikan di Negara-Negara Anggota ASEAN menurut Jenis Ikan pada 2022 (dalam Kg/Kapita/Tahun)<sup>7</sup>

Negara	Jenis Ikan				Total
	Ikan Demersal <sup>8</sup>	Ikan Air Tawar	Ikan Laut	Ikan Pelagis <sup>9</sup>	
Indonesia	6,8	17,89	0,88	11,32	41,25
Malaysia	11,34	6,07	8,79	17,77	52,17
Kamboja	0,04	30,61	7,32	0,33	40,96
Vietnam	0,27	16,67	8,82	3,29	40,94
Myanmar	-	33,42	6,62	0,18	40,31
Thailand	1,24	8,86	0,04	11,3	28,62
Filipina	3,08	7,72	0,72	11,87	26,19
Laos	-	24,42	0,55	0,18	25,21

Sumber: World Population Review (2022), dimodifikasi

<sup>7</sup> Singapura dan Brunei Darussalam tidak dimasukkan karena data tidak mencukupi.

<sup>8</sup> Ikan demersal adalah ikan yang hidup dan mencari makan di dasar laut atau danau (FAO, 2020).

<sup>9</sup> Berbeda dengan ikan demersal, ikan pelagis adalah ikan yang hidup di lapisan permukaan air jauh dari dasar laut, biasanya pada kedalaman menengah (FAO, 2020).

## TENTANG PENULIS

**Sarah Firdausi** adalah *Research and Policy Analyst* di CIPS. Sebelum bergabung dengan CIPS, Sarah telah memimpin dan berpartisipasi dalam beberapa proyek sosial yang berkaitan dengan pengembangan masyarakat dan kerelawanan dari skala lokal hingga internasional. Sarah lulus dari Columbia University dengan gelar Master of Social Work dengan spesialisasi di bidang Praktik Kebijakan. Ia juga memiliki gelar Sarjana Ilmu Politik dari Jurusan Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada.

**Ibnu Budiman** adalah Manajer Lingkungan di Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) dengan pengalaman lebih dari 10 tahun di bidang Keberlanjutan. Dengan gelar Sarjana Geografi dari Universitas Indonesia (UI) dan gelar Magister Ilmu Lingkungan dari Universitas Wageningen, saat ini ia adalah kandidat PhD di bidang Sosiologi Pembangunan. Pengalamannya sebelum bergabung dengan GAIN beragam, antara lain bekerja di bidang penelitian untuk Oxfam, World Resources Institute (WRI), Bappenas, ASEAN Centre for Energy (ACE), Bank Dunia, Global Green Growth Institute (GGGI), dan CIPS.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Makalah ini dapat terwujud berkat dukungan dari GAIN dan Food and Land Use Coalition (FOLU).

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Aang Sutrisna, Eristyana Sari, dan tim Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) atas masukan dan dukungannya yang berharga. Penulis juga berterima kasih kepada seluruh pemangku kebijakan yang telah menghadiri diskusi kebijakan yang diselenggarakan CIPS dan Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) pada 10 Desember 2024.

Kerja kami bergantung pada dukungan Anda.

Kunjungi [www.cips-indonesia.org/donate](http://www.cips-indonesia.org/donate) untuk mendukung CIPS.



# Lihat ringkasan kebijakan lain yang diterbitkan Center for Indonesian Policy Studies



Meninjau Kembali Kebijakan Label Gizi pada Bagian Depan Kemasan (*Front-of-Pack Nutrition Labeling*) di Indonesia



Mengembangkan Program-Program Pengurangan Susut dan Sisa Pangan (*Food Loss and Waste*) di Indonesia



Meningkatkan Daya Saing Unggas Indonesia: Peluang Perdagangan Daging Broiler



Meningkatkan Partisipasi Petani dalam Sistem Resi Gudang



Dari Larangan hingga Percepatan Ekspor: Mengapa Intervensi Harga Minyak Goreng Tidak Efektif



Produktivitas Kelapa Sawit Tetap Terbatas Seiring Melonjaknya Harga Minyak Goreng di Indonesia



Meningkatkan Inklusi dalam Indeks Literasi Digital Nasional: Dari Pengukuran hingga Pemberdayaan



Mendirikan Perguruan Tinggi Luar Negeri di Indonesia



Meningkatkan Kesiapan Kerja Lulusan SMK melalui Perbaikan Kurikulum Bahasa Inggris

Silahkan kunjungi situs kami untuk membaca publikasi lainnya:

[www.cips-indonesia.org/publications](http://www.cips-indonesia.org/publications)

